

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan merupakan bukti pertanggung jawaban atas kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perusahaan, laporan keuangan digunakan sebagai informasi bagi stakeholder untuk mengambil sebuah keputusan. Laporan keuangan yang baik merupakan laporan keuangan yang telah diaudit auditor yang terbebas dari salah saji kekeliruan maupun kecurangan.

Masalah yang sering terjadi di dalam perusahaan yaitu adanya kecurangan yang berupa manipulasi laporan keuangan, penghilangan dokumen, mark laba yang dapat merugikan perekonomian negara. Tindakan kecurangan tersebut biasa terjadi karena adanya kesempatan yang dirasa menguntungkan bagi pihak yang bersangkutan. Hal ini diperkuat oleh Data Indeks Persepsi Korupsi pada tahun 2016 yang dilansir Transparency International, Indonesia berada pada peringkat 90 dari 176 negara dengan skor 37. Indonesia tergolong negara dengan tingkat korupsi yang cukup tinggi (www.sindonews.com).

Mendeteksi kecurangan tentunya membutuhkan kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan tersebut. Kemampuan mengerti tentang kecurangan, jenis dan karakteristik kecurangan serta bagaimana menangani kecurangan. Kecurangan merupakan bentuk penipuan yang sengaja dilakukan sehingga dapat menimbulkan

kerugian tanpa disadari oleh pihak yang dirugikan dan memberi keuntungan bagi pelaku kecurangan (Windasari dan Juliarsa, 2016).

Dalam pemeriksaan audit khususnya pada audit internal pemerintah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2008 bahwa sistem pengendalian intern pemerintah, pelaksanaan pengendalian tersebut dilaksanakan oleh aparat pengawasan intern pemerintah (APIP), yaitu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jendral, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kota.

BPKP merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah presiden dan bertanggung jawab kepada presiden yang melaksanakan tugasnya sesuai dengan standar audit APIP. Tugas BPKP melaksanakan tugas pemerintah dibidang keuangan dan pembangunan diantaranya konsultasi, asistensi evaluasi pemberantasan KKN serta pendidikan dan pelatihan pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Salah satu kasus yang terjadi seperti kasus IM2 dan indosat dimana auditor BPKP dinyatakan gagal. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) mengabulkan gugatan dari mantan dirut IM2 dan indosat Indar Atmanto terkait laporan audit BPKP pada tahun 2012. Laporan tersebut berisi tentang kerugian Negara senilai 1,3 triliun dalam pembangunan jaringan frekuensi IM2 dan indosat dinyatakan gagal. Laporan tersebut dinyatakan tidak sah dan cacat oleh Hakim Herinto namun hakim PTUN tidak mengabulkan seluruh gugatan Indar Atmanto, IM2 dan indosat. Adapun tuntutan uang paksa tidak dikabulkan Majelis Hakim. Adanya alat bukti laporan BPKP otomatis lumpuh.

Adapun fenomena lain yang terjadi Surabaya yaitu kecurangan yang dilakukan oleh BPKP pada tahun 2016 diberitakan bahwa BPKP digugat oleh Tersangka Kasus dugaan korupsi pembangunan gedung untuk mess santri di Kanwil Kementerian Agama (Kemeng) Jatim mengancam akan menggugat BPKP. Dikarenakan audit yang dikeluarkan BPKP itu dinilai tidak benar atau diragukan keabsahannya. Gugatan tersebut diberikan kepada Nur M Herlambang dan Bagus Sutarto. Bahwa dalam kasus ini terdapat perbedaan antara hasil audit dari BPKP dan BPK. Penyidik lebih berpedoman pada hasil dari BPKP yang menyatakan adanya kerugian Negara dalam proyek pembangunan Gedung Mess Santri sedangkan hasil dari BPK menyatakan tidak adanya kerugian Negara dalam pembangunan gedung di Kejati Jatim. Kepala BPKP Jatim Hotman Napitupulu menyatakan bahwa pihaknya siap menghadapi gugatan dari tersangka.

Kasus-kasus tersebut yang membuat kepercayaan publik semakin menurun akan profesi akuntan pemerintah dalam mendeteksi kecurangan. Banyak yang bertanya tanggung jawab dan fungsi auditor. Peran auditor diperlukan untuk mengembalikan kepercayaan publik dengan menciptakan *good governance* agar terbebas dari salah saji material maupun non material.

Pendeteksian kecurangan tersebut dapat tercapai secara efektif, apabila seorang auditor harus menerapkan sikap skeptisme profesionalnya. Seringkali kegagalan audit terjadi karena auditor tidak menerapkan sikap skeptisme dalam melakukan proses audit. Hal ini menyebabkan timbulnya kegagalan auditor dalam

menilai informasi keuangan. Kegagalan tersebut disebabkan karena rendahnya skeptisme profesional (Oktaviani,2015). Menurut Anggriawan (2014) dalam Ranu dan Merawati (2017) skeptisme adalah sikap kritis dalam menilai kehandalan asersi atau bukti yang diperoleh, sehingga dalam melakukan proses audit seorang auditor memiliki keyakinan yang cukup tinggi atas suatu asersi atau bukti yang telah diperolehnya dan juga mempertimbangkan kecukupan dan kesesuaian bukti yang diperoleh. Auditor yang memiliki sikap skeptisme profesional yang tinggi akan lebih dapat mendeteksi kecurangan yang terjadi.

Penelitian Hartan (2016) Arsendy(2017) skeptisme profesional berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi fraud tetapi dengan penelitian Ranu (2017) dan Suryanto et al (2017) skeptisme profesional tidak berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi fraud (kecurangan).

Faktor lain yang menyebabkan kegagalan audit yaitu rendahnya sikap independensi. Menurut Fuad (2015) Keadaan yang sering kali mengganggu sikap mental independen auditor adalah :

1. Sebagai seorang yang melaksanakan audit secara independen, auditor dibayar oleh kliennya atas jasa tersebut
2. Sebagai penjual jasa seringkali auditor mempunyai kecenderungan untuk memuaskan keinginan kliennya

3. Mempertahankan sikap mental independen seringkali dapat menyebabkan lepasnya klien.

Mengatasi keadaan tersebut seorang auditor harus meningkatkan sikap independensi. Sikap independensi diperlukan dalam mendeteksi kecurangan, karena diharuskan tidak memihak kepada siapapun. Independensi salah satu sikap yang dibutuhkan untuk menjaga kualitas audit. Seorang auditor harus menjalani pelatihan yang cukup dan kegiatan penunjang lainnya untuk menghasilkan suatu pemeriksaan yang baik dan diharapkan auditor selalu bersikap objektif dan adil dalam memberikan pendapatnya. Penelitian yang dilakukan Fuad (2016), Hartan (2016), Windasari dan Juliarsa (2017) menunjukkan bahwa independensi berpengaruh positif pada pendeteksian kecurangan namun dengan penelitian Sartika (2015) independensi tidak berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud* (kecurangan).

Ketidakkonsistenan antara penelitian penelitian sebelumnya, menjadi alasan peneliti ingin menguji kembali mengenai skeptisme profesional, independensi dalam mendeteksi kecurangan. Peneliti menambahkan variabel etika profesi, karena dianggap etika profesi merupakan faktor yang dianggap mampu mempengaruhi seorang auditor dalam mendeteksi kecurangan. Etika profesi adalah panduan atau nilai-nilai yang berfungsi untuk menilai benar atau salahnya perbuatan atau perilaku. Peran etika dalam profesi auditor menyediakan panduan atau standar- standar yang ditetapkan agar tidak tergoda dalam mengambil keputusan. Seorang auditor agar tidak melanggar prinsip-prinsip etika harus menjaga kewaspadaannya agar tidak takluk

pada godaan dan menjerumuskan kedalam pelanggaran. Melalui etika profesi auditor yang baik, auditor dapat melaksanakan proses audit secara efektif dan menilai sejauh mana kedisiplinan auditor dalam menjalankan kewajibannya. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk membahas mengenai “PENGARUH SKEPTISME PROFESIONAL, INDEPENDENSI DAN ETIKA PROFESI AUDITOR DALAM PENDETEKSIAN FRAUD (Studi kasus pada BPKP Semarang)”

1.2 Identifikasi Masalah

Kegagalan audit yang sering terjadi membuat masyarakat beranggapan rendah akan profesi akuntan. Salah satu kegagalan audit yang sering terjadi adalah dalam pendeteksian fraud (kecurangan).

Sikap skeptisme profesional yang rendah membuat auditor tidak berfikir secara kritis dalam mendeteksi *fraud* (kecurangan). Kebanyakan auditor masih pasif dalam menilai informasi laporan keuangan yang disajikan oleh klien.

Auditor belum semaksimalnya menerapkan sikap independensi karena banyak faktor yang mengganggu mental auditor tersebut sehingga auditor tidak bisa bersikap secara objektif, auditor jika tidak menerapkan sikap independensi akan membuat keraguan bagi pengguna laporan keuangan.

Melalui etika profesi yang dimiliki auditor, auditor dapat melakukan proses audit secara efektif sesuai dengan standar audit yang sudah ditetapkan. Namun tidak semua auditor memiliki etika profesi yang tinggi dalam proses audit.

1.3 Rumusan Masalah

1. Apakah skeptisme profesional berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud* (kecurangan) ?
2. Apakah Independensi berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud* (kecurangan) ?
3. Apakah etika profesi berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud* (kecurangan) ?
4. Apakah skeptisme profesional, independensi dan etika profesi berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud* (kecurangan) ?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisa pengaruh skeptisme auditor terhadap kemampuan auditor mendeteksi *fraud*

2. Untuk menganalisa pengaruh independensi terhadap kemampuan auditor mendeteksi *fraud*
3. Untuk menganalisa pengaruh etika profesi terhadap kemampuan auditor mendeteksi *fraud*.
4. Untuk menganalisa pengaruh skeptisme auditor, independensi dan etika profesi terhadap kemampuan auditor mendeteksi *fraud*

1.4.2 Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis, dapat memperluas wawasan tentang pendeteksian *fraud*.
2. Bagi BPKP, sebagai masukan dan perkembangan juga sebagai bahan pertimbangan membantu dalam untuk meningkatkan kualitas auditor dalam mendeteksi *fraud*.
3. Bagi dunia pendidikan, sebagai bahan kajian dan studi banding dengan tambahan referensi bagi peneliti selanjutnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika dan struktur penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN.

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI.

Bab ini berisikan landasan teoritis yang menjelaskan teori-teori pendukung perumusan hipotesis, didukung dengan penelitian terdahulu. Kerangka pemikiran teoritis menjelaskan permasalahan yang akan diteliti yaitu tentang apa yang seharusnya, sehingga timbulnya adanya hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN.

Bab ini menjelaskan definisi operasional yang mendeskripsikan variable-variabel dalam penelitian. Penentuan sampel menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan populasi, jumlah sampel, lokasi sampel dan responden yang akan dimintai data. Jenis dan sumber data mendeskripsikan tentang jenis data dari variable-variabel dalam penelitian., baik berupa data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data menjelaskan tentang cara pengambilan dan penelitian yang digunakan. Metode analisis mendeskripsikan tentang jenis atau model analisis dan mekanisme alat analisis yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN.

Bab ini berisi tentang penyajian hasil yang meliputi deskripsi obyek penelitian, analisis data dan pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan penyajian secara singkat apa yang telah diperoleh dari pembahasan. Saran merupakan anjuran yang disampaikan kepada pihak yang terkait dengan hasil penelitian

